

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Teori dan penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind Hill, 1997.
- Azed, Abdul Bari dan Amin, Makmur, *Pemilu dan Parpol di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2005.
- Azhary, *Negara Hukum, Suatu Analisis Yuridis-Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: Disertasi, Fakultas Universitas Indonesia, 1998.
- Bob Hering, *Membangun Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Hasta Mitra, 2003.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ence, Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Fadjar, Abdul Mukthie, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: In-TRANS, 2003.
- , *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Fatkurochman dkk., *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditia Bakti, 2004.
- Herry, Nurdy, *Jejak Freemanson dan Zionis di Indonesia*, Jakarta: Cakrawala, 2006.

- Koirudin, *Profil Pemilu 2004 Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Machfud MD., Moh, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan CV 'Sinar Bakti', 1988.
- Nasution, Adnan Buyung, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Hukum dan Peradilan*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- , *Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Tata Negara*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- , *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 2001.
- Nurudin, Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.
- Philipus, M.Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam Bagir Manan, "Kedaulatan Rakyat, Hak Azasi Manusia dan Negara Hukum," Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, Jakarta: Eresco, 1981.
- , *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Ranawijaya, Usep, *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Soehino, *Hukum Tata Negara: Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- , *Hukum Tata Negara: Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1983.
- , *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sibuea, Hotma P., *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta: Krakatauw Book, 2006
- , *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Jakarta: Universitas 17 Agustus, 2007.
- , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw, 2007.
- Soemantri Sri, *Hak Menguji Materiil di Idonesia*, Bandung: Alumni, 1986.
- Susanto, Agung, *Hukum Acara Perkara Konstitusi, Prosedur Berperkara Pada Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Wheare, K.C., *Konstitusi-Konstitusi Modern*, terj. Muhammad Hardani, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002.
- Zaini, Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

-----, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, LN No. 98 Tahun 2003 TLN No. 4316

-----, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 8 Tahun 2004 TLN No. 4358

C. Jurnal, Kamus, Majalah Ilmiah dan lain-lain

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis* (Makalah pada Seminar Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1999).

Santoso, Anada, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Alumni, 1990.

Sidharta, Arief B., *UUD 1945 Dalam Falsafah Hukum Konstitusi*, (Makalah Dalam Diskusi Panel Pembaruan UUD 1945, Bandung: 14 Agustus, 1999).

Soemantri Sri, *UUD 1945 Kedudukan Dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara*”, Jurnal Demokrasi dan HAM, vol.1, No.4, September-November 2001.

-----, *Kedudukan, Fungsi, Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Makalah Yang Disampaikan Pada Diskusi Publik Tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2 Juli 2003).

Tim Penyusunan Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

D. Putusan Badan Peradilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 13/PUU-1/2003 Mengenai Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Penetapan Perpu No. 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali, 12 Oktober 2002. Menjadi Undang-undang Terhadap UUD 1945, Jakarta 23 Juli 2004 oleh Masykur Abdul Kadir sebagai Pemohon dengan Pemerintah sebagai Termohon.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 008/PUU-II/2004 Tentang Permohonan Pengujian UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 oleh K.H. Abdurrahman Wahid dan Alwi Shihab disebut dengan Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemerintah yang disebut dengan Termohon.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 056/PUU-VI/2008 Tentang Permohonan Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 oleh M. Fadjroel Rachman, Mariana, dan Bob Febrian disebut dengan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dengan Pemerintah yang disebut dengan Termohon.

